

HALAMAN PERSETUJUAN

Pada hari ini Senin tanggal 7 bulan Oktober tahun 1991
Skripsi dengan judul : Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapa-
tan Asli Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat
II Kabupaten Gowa

N a m a : Andi Panda Alamsyah

Nomor Stb/Nirm : 45 86 02 0572 / 87 113 3268

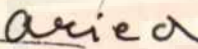
J u r u s a n : Ilmu Administrasi

Disetujui untuk diujikan pada tanggal 26 Oktober 1991

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



(Drs. Faried Ali. SH.MS)



(Drs. Abdul Majid Mahyuddin)

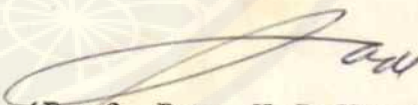
Mengetahui :

D e k a n
FISIPOL Universitas "45"

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi
FISIPOL Univ. "45"



(Drs. H. Muh. Thala)



(Prof. Drs. H. Sadly Ad. MPA)

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini Senin tanggal 7 bulan Oktober tahun 1991
Skripsi dengan judul : Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapa-
tan Asli Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat
II Kabupaten Gowa

N a m a : Andi Panda Alamsyah

Nomor Stb/Nirm : 45 86 02 0572 / 87 113 3268

J u r u s a n : Ilmu Administrasi

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung
Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar sarjana Negara pada Jurusan Administrasi Negara Program
SI.

PENGAWASAN UMUM

Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid
Rektor Universitas "45"

Prof. H. Sadly AD, MPA
Dekan FISIPOL Unhas

Prof. Dr. H. M. Syukur Abdullah

PANITIA

Drs. H. Mohammad Thala
K e t u a

Drs. Guntur Karnaeni
Sekretaris

TIM PENGUJI

1. Drs. H. Mohammad Thala (.....)
2. Drs. Faried Ali, SH.MS (.....)
3. Drs. M. Tayeb Tamma (.....)
4. Dra. H. Chamisah Thaib (.....)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufiq-Nya kepada penulis sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami aral dan rintangan, tetapi dengan tekad yang bulat serta petunjuk-petunjuk dari-Nya, maka segala aral dan rintang itu dapat penulis lalui. Demikian pula bahwa penyusunan skripsi ini, penulis yakin masih terdapat kekeliruan dan kesalahan baik dalam teknis maupun dalam penjelasan-penjelasanannya.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran-saran maupun kritikan dari semua pihak guna penyempurnaan lebih lanjut isi skripsi ini.

Bahwa penyusunan skripsi ini adalah tidak terlepas dari bantuan serta petunjuk-petunjuk dari beberapa pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat serta rasa terima kasih, khususnya kepada :

1. Bapak Drs. Faried Ali, SH. MS dan Bapak Drs. Abdul Majid Mahyuddin masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini.
2. Bapak Rektor Universitas "45", Prof, Mr. Dr. A. Zainal Abidin Farid yang telah memimpin Universitas dengan segala kebijaksanaannya.

3. Bapak Drs. H. Muh. Thala selaku Dekan 'Fakultas Sosial Politik Universitas "45" Ujung Pandang
4. Bapak Prof. H. Sadly Ad. MPA selaku jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Sosial Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
5. Bapak Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Gowa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian pada Dipenda Dati II Gowa.
6. Para Staf pengajar dan administrasi Fakultas Sosial Politik yang selama ini telah banyak mmebrikan pengetahuan serta melayani penulis selama pennulis belajar dibangku kuliah.
7. Dan kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan dorongan yang tak sempat penulis sebutkan satu-persatu.
8. Demikian pula kepada kakak dan adik-adik penulis yang telah banyak memberikan motivasi serta semangat kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini.
9. Dan akhirnya kepada Ayahanda Andi Syahrir Mappakanro dan Ibunda tercinta Andi Zaelani yang sejak penulis masih dalam ayunan hingga sekarang ini telah banyak berkorban baik materil maupun spirituil yang diberikan kepada penulis.

Demikianlah, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Inayahnya kepada kita semua, amin...

Ujung Pandang, 26 Oktober 1991

P e n u l i s,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Kerangka Konsepsional	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Peranan dan Pentingnya Penerimaan Pendapa- tan Asli Daerah	9
B. Jenis-jenis Pendapatan Daerah	12
BAB III GAMBARAN UMUM SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH TINGKAT II GOWA	24
A. Pendapatan Dari Sektor Pajak Daerah	24
B. Pendapatan Dari Sektor Retribusi Daerah ...	34
C. Pendapatan Dari Sektor Perusahaan Daerah ..	46
D. Pendapatan Dari Sektor Dinas-dinas Daerah dan Pendapatan Lainnya yang sah	47
E. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menggali Pendapatan Asli Daerah	54
B. Proses Penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh DIPENDA Tingkat II Gowa	62
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor DIPENDA Tk. II Gowa	65
BAB V P E N U T U P.....	69
A. K e s i m p u l a n	69
B. Saran-Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Alasan Memilih Judul

Pembangunan nasional pada hakekat adalah usaha untuk mewujudkan Manusia Indonesia seutuhnya dengan dilandasi oleh semangat dan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai manifestasi dari tekad bangsa Indonesia, maka pembangunan di segala bidang kehidupan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang mandiri serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dalam arti yang seluas-luasnya.

Pembentukan sosok manusia yang selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah negara yang telah dijabarkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai konsep dasar operasional pembangunan, terutama dalam proses pembentukan sosok manusia yang dimaksud. Oleh karena itu sebagai bangsa yang hidup di bumi Pancasila seyogianya dapat mendalami arti pembangunan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Pada prinsipnya hal ini merupakan suatu tuntutan moral sebagai suatu bangsa yang menyadari sepenuhnya arti dan makna pembangunan bangsanya.

Sebagai konsekwensi logis dari proses pembangunan juga merupakan proses jangka panjang untuk membentuk manusia-manusia pembangunan, maka diperlukan adanya partisipasi secara menyeluruh dari seluruh lapisan masyarakat, khu-

susnya instansi-instansi pemerintah terkait.

Instansi-instansi pemerintah inilah yang mempunyai tugas yang lebih berat oleh karena merekalah sebagai pelaksana sekaligus sebagai motivator pembangunan nasional. Salah satu instansi pemerintah yang sangat terkait dan memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan pembangunan nasional Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA). Dinas ini diharapkan memberikan sumbangsinya, terutama dalam usahanya meningkatkan pendapatan daerah maka pembangunan daerah yang juga merupakan bagian dari pembangunan nasional akan lebih baik.

Sebagai Dinas Pendapatan Daerah yang juga merupakan unit organisasi dalam pembangunan daerah, maka keterlibatannya sebagai instansi pemerintah memiliki peranan tersendiri dalam sistem birokrasi pemerintah yang seharusnya dapat menciptakan suatu corak pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Karena hal ini akan lebih baik mendukung peranan dan fungsinya sebagai pelaksana dan motivator pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) selalu memberikan sumbangsih pemikiran di dalam menyukseskan program kerjanya. Khususnya di bidang pendapatan daerah, instansi ini akan lebih mengoptimasikan penerimaan daerah dengan melalui upaya-upaya tersendiri yang sesuai dengan jalur-jalur penerimaan pendapatan daerah.

Untuk itulah pada kesempatan ini kami akan mencoba mengangkat suatu permasalahan yang menyangkut Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA). Sengaja kami memilih Kantor Dinas Pendapatan Daerah ini oleh karena instansi inilah yang lebih mempunyai kompetensi dari instansi-instansi lainnya. Namun demikian Dinas Pendapatan Daerah yang akan kami pilih sebagai tempat penelitian adalah pada Kantor DIPENDA Tingkat II Gowa, dengan judul "UPAYA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II GOWA".

Adapun yang menjadi alasan mengapa kami memilih Kabupaten Gowa sebagai lokasi penelitian kami adalah didasarkan pada alasan-alasan seperti berikut ini :

1. Lokasi Penelitian ini merupakan daerah dimana Pendapatan Asli daerahnya masih cukup rendah sehingga perlu mendapat perhatian yang serius guna mengusahakan peningkatan pendapatan aslinya.
2. Bahwa berdasarkan pada kenyataan Kabupaten Dati II Gowa memiliki sumber-sumber pendapatan asli yang cukup banyak, namun oleh karena sumber-sumber tersebut belum dikelola secara intensif sehingga potensi itu tidak dapat memberikan hasil yang maksimal terhadap pendapatan/penerimaan daerahnya.
3. Disamping itu pula bahwa lokasi tempat penelitian penulis cukup dekat sehingga lebih mudah untuk dicapai

dengan biaya yang murah.

B. Rumusan Masalah

Masalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa adalah suatu hal yang menarik serta sangat luas jangkauan analisis yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya unsur-unsur yang terkait, terutama mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Oleh karena kompleksnya masalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu kiranya penulis membatasi permasalahan tersebut dengan merumuskan beberapa masalah seperti berikut ini :

1. Bagaimanakah mengupayakan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ditinjau dari segi pelaksanaannya pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimanakah sistem penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilihat dari segi prosesnya pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa ?
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa ?

C. Kerangka Konsepsional

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa peranan dan fungsi Pendapatan Asli Daerah dalam pembangunan Daerah

adalah tidak terlepas dari peranan dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah sebagai titik sentral upaya penerimaan pendapatan asli daerah.

Oleh karena itulah terdapat beberapa kerangka konsepsional yang menjadi pendukung di dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, seperti berikut ini :

1. Bahwa Pemerintah Daerah di dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak akan berfungsi secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengukur secara nyata kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Oleh karena itu, agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada Daerah, maka kepada Daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dengan demikian untuk dapat meningkatkan biaya-biaya pembangunan daerah diperlukan penambahan keuangan dengan melalui upaya-upaya pengelolaan segala sumber potensi Daerah yang merupakan obyek keuangan Daerah secara optimal yang mengurus secara baik dan terarah pada semua sumber pendapatan Daerah yang telah ada.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa di dalam usahanya meningkatkan Pendapatan Daerahnya.
- b. Untuk mengetahui sistem yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa, terutama dari segi proses penerimaan yang dilakukan di dalam mengelola sumber Pendapatan Asli Daerahnya.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tingkat II Gowa.
- d. Untuk dapat memahami arti pentingnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu asset bagi Daerah di dalam menyukseskan pembangunan daerahnya, sekaligus menyukseskan pembangunan nasional secara keseluruhan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Merupakan informasi kepada pemerintah pada umumnya dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa pada khususnya agar dapat mengambil langkah-langkah kebijaksanaan terhadap penerimaan pendapatan asli daerahnya.
- b. Agar dapat memperoleh hasil penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Tingkat II Gowa sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu

pola kebijaksanaan agar mendapatkan atau menciptakan penerimaan yang efektif.

- c. Dapat memperdalam pengertian terhadap penerimaan yang strategis yang dapat dikembangkan dan hal itu memungkinkannya dalam suatu posisi yang strategis pula.

E. Metode Penelitian

Untuk dapat memecahkan persoalan yang telah diutarakan di atas, maka diperlukan suatu data, baik data kepustakaan maupun data yang didapatkan dilapangan. Dan untuk mendapatkan data-data tersebut digunakan beberapa metode tertentu seperti berikut ini :

1. Penelitian Pustaka.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data sebagai landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, dokumen-dokumen Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa serta sumber-sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan.

2. Penelitian Lapangan.

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan beberapa metode pengumpulan data, yaitu :

- a. Obsevasi ; yang penulis melakukan pengamatan dengan melihat secara langsung mengenai situasi dan kondisi lingkungan kerja serta sistem kerja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa.

b. Wawancara ; yaitu penulis melakukan suatu cara pengumpulan data serta informasi yang dibutuhkan dengan melalui wawancara langsung terhadap para pejabat yang dianggap berkopetensi dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang diajukan. Adapun yang menjadi responden dalam wawancara ini adalah :

- 1) Bagian Umum
- 2) Bagian Hukum
- 3) Bagian Pemerintahan
- 4) Bagian Kesejahteraan
- 5) Bagian Hubungan Masyarakat
- 6) Bagian Kepegawaian

Dari beberapa bagian ini, penelitian ini tidak dilakukan terhadap semua anggota populasi, melainkan dengan menentukan sampel penelitian. Hal tersebut disebabkan besarnya jumlah populasi, keadaan populasi yang bervariasi dan banyaknya jenis tugas (bidangnya) masing-masing yang dilakukan pada bagian-bagian yang ada.

Dengan demikian penentuan sampel ini adalah ditentukan secara sengaja yakni sebanyak 45 % dari seluruh jumlah populasi sebanyak 101 orang. Jumlah tersebut adalah didasarkan pada bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan dan disamping itu juga telah dapat mewakili dari seluruh jumlah populasi yang ada.

B A B II

T I N J A U A N P U S T A K A

A. Peranan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dikelola dari upaya-upaya pemerintah daerah di dalam penerimaan-penerimaan sumber dana yang memungkinkannya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan. Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan hal yang sangat penting melihat peranan dan fungsinya. Untuk itulah dalam pembahasan berikut ini akan diuraikan bagaimana peranan dan fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah adalah diarahkan untuk kepentingan-kepentingan daerah itu sendiri dengan tujuan agar daerah tersebut dapat membiayai dirinya sendiri. PAD ini juga merupakan bagian dari pada pendapatan nasional secara keseluruhan, oleh karena pendapatan nasional adalah juga bertumpu pada sumber-sumber pendapatan Asli dari daerah-daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah harus memberikan 10 % dari penerimaan tersebut kepada pemerintah daerah Tingkat I kemudian pemerintah Daerah Tingkat I juga menyerahkan sebesar 10 % dari penerimaan-penerimaan pajaknya kepada pemerintah pusat. Dan dari pendapatan-pendapatan inilah

pemerintah pusat mengembalikannya kepada pemerintah daerah melalui realisasi-realisis pembangunan nasional yang hingga sekarang ini dapat kita lihat keberhasilannya. Dengan demikian kedudukan Pendapatan Daerah merupakan bagian dari pendapatan nasional secara keseluruhan. Sehingga keberhasilan pembangunan daerah juga merupakan keberhasilan pembangunan nasional.

Dengan melihat gambaran di atas menunjukkan bahwa kedudukan pendapatan daerah dalam pendapatan nasional memegang peranan penting, karena selain berfungsi untuk pembangunan daerah yang bersangkutan juga berfungsi sebagai pendukung pembangunan nasional secara umum. Lebih lanjut dijelaskan di sini adalah apa yang menjadi sasaran dari Pendapatan Daerah merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan program pembangunan, melainkan suatu yang bersifat integritas, dan berkesinambungan dengan program-program tersebut.

Sebagaimana yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983 Bidang Pembangunan Daerah sub C tentang Pendapatan Daerah (1983 : 134) mengemukakan bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah maka diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyatnya, disamping itu juga diperlukan kemampuan daerah dengan upaya-upaya peningkatan Daerah baik pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tetib terhadap sumber-sumber yang ada maupun dengan penggalan sumber-sumber keuangan baru yang

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya posisi keuangan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah sangat disadari oleh pemerintah pusat. Demikian pula terhadap alternatif untuk mendapatkan keuangan yang memadai telah pula dipertimbangkan. Hal ini dapat kita lihat pula dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 bahwa :

"Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada Daerah, maka kepada Daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku".

Demikian pula bahwa untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan Daerah dalam melaksanakan otonominya.

Sehubungan dengan pentingnya peranan dan fungsi pendapatan asli daerah adalah dimaksudkan untuk dapat membiayai program-program pembangunan daerahnya. Sebagaimana oleh Pamuji (1975 : 11) menegaskan :

"Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengukur secara nyata Kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri"

Pendapat yang relatif sama juga dikemukakan oleh Ibnu Syamsi (1983 : 190) yang menempatkan keuangan Daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumahnya sendiri.

Untuk itulah peranan dan fungsi Pendapatan Daerah, dalam hal ini adalah pendapatan Asli Daerah terhadap Daerah otonom adalah merupakan Sokoguru dalam kelestarian kelangsungan Otonomi Daerah itu sendiri dan sumber dana untuk membiayai kontinuitas Pembangunan di Daerah.

Dan salah satu usaha yang mutlak harus dicapai dalam mewujudkan fungsi pendapatan Daerah dimaksud adalah menggali dan mengelolah potensi daerah yang merupakan subyek sumber pendapatan daerah secara maksimal dan mengurus secara baik dan terarah pada semua sumber Pendapatan Daerah yang telah ada. Hal ini jelas juga tidak terlepas dari fungsi dan peranan seluruh aparatur daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah. Disamping itu pula hal yang tak kalah pentingnya dalam rangka pengembangan Pendapatan Asli Daerah adalah bagaimana mengantisipasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif di dalam menggali dan mengelolah potensi daerahnya sendiri.

B. Jenis-Jenis Pendapatan Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum dari sumber-sumber pendapatan Asli Daerah adalah pada pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut :

Sumber Pendapatan Daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah sendiri, yang terdiri dari :
 - a. hasil pajak Daerah
 - b. hasil retribusi Daerah
 - c. lain-lain usaha Daerah yang sah.
2. Pendapatan berasal dari pemerintah yang terdiri dari :
 - a. sumbangan dari pemerintah
 - b. sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan.
3. Lain-lain pendapatan yang sah.

Dengan demikian bahwa pendapatan Daerah secara garis besarnya terdiri dari dua bahagian yaitu ; Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan non asli Daerah.

Dalam penjelasan berikut ini hanya akan dijelaskan tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, yakni pada keempat jenis sumber tersebut di atas.

1. Pajak Daerah.

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping Retribusi Daerah. Sebelum dijelaskan lebih lanjut mengenai Pajak Daerah, terlebih dahulu perlu dijelaskan disini tentang pengertian pajak itu sendiri.

Menurut Rochmat Sumitro, (1979 : 23) mengemukakan bahwa :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir kesektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat

di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal (tegen prestatie) untuk membiayai pengeluaran umum (publike uitgaven), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan".

Pendapat ini kemudian disempurnakan kembali oleh ahli yang sama (1980 : 30) yang mengemukakan bahwa :

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment".

Kalau kita melihat pendapat yang dikemukakan oleh Rochmat Sumitro yang kedua akan tergambar bahwa pajak yang diperoleh dari rakyat adalah untuk kepentingan rakyat itu sendiri, namun demikian pengembalian pajak tersebut tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk relaisasi-realisasi pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat itu sendiri.

Pendapat lain dikemukakan oleh Soemohamidjojo (1987 : 35) mengemukakan bahwa :

"Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai ciri-ciri tertentu yang mendasar pada Pajak, yaitu :

1. pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan hukum atau undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya.

2. pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
3. hasil pungutan pajak digunakan untuk menutup pengeluaran Negara dan sisanya, apabila masih ada digunakan untuk investasi.
4. pajak disamping sebagai sumber keuangan Negara juga berfungsi sebagai pengatur.

Setelah diketahui apa yang dimaksud dengan pajak beserta dengan ciri-cirinya, maka berikut ini akan diuraikan tentang pengertian Pajak Daerah.

Menurut Rochmat Sumitro (ibid) merumuskan pajak Daerah sebagai berikut :

"Pajak Daerah adalah pajak lokal adalah pajak dipungut oleh Daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi Kotapraja, Kabupaten dan sebagainya"

Sedangkan Siagian merumuskan sebagai "Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah dan dinyatakan sebagai pajak Daerah dengan Undang-Undang"

Dengan melihat pendapat-pendapat di atas dapatlah disimpulkan pengertian pajak secara umum yakni Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah untuk dipungut berdasarkan undang-undang yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran Daerah sebagai Badan Hukum Publik.

Dengan demikian dapatlah diketahui bagaimna ciri-ciri Pajak Daerah seperti berikut ini :

1. Pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah

2. Penyerahan dilakukan berdasarkan peraturan undang-undang.
3. Pajak Daerah dipungut oleh Daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan Pajak Daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai Badan Hukum Publik.

Pajak-pajak Daerah juga dapat kita bagi ke dalam dua bahagian besar yaitu Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II. Khusus mengenai Pajak Daerah Tingkat II adalah berarti Pajak Daerah yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II atau pajak Daerah yang belum diatur oleh instansi yang lebih tinggi. Pajak Daerah Tingkat II dapat diperinci seperti berikut ini :

1. Pajak pertunjukan/tontonan dan keramaian.
2. Pajak reklame (tidak dimuat dalam majallah/koran)
3. Pajak anjing
4. Pajak petasan dan kembang api
5. Pajak minuman keras
6. Pajak kendaraan tak bermotor
7. Pajak atas izin perjudian
8. Pajak hiasan kuburan
9. Pajak berdiam di Daerah lebih dari 120 hari tanpa berkediaman tetap.
10. Pajak atas milik bangunan dan halaman yang berbatas-

an dengan jalan di darat, air dan udara.

11. Pajak sekolah.
12. Pajak penerangan jalan.
13. Pajak atas milik bangunan keturutannya/tanah kosong dibagi-bagi tertentu dari daerah.
14. Pajak atas milik bangunan dan halaman yang berbatasan dengan jalan umum.
15. Pajak pemberian air minum
16. Pajak rumah bola
17. Pajak forensen
18. pajak pendaftaran
19. Pajak rumah penginapan
20. Pajak terhadap barang yang menjulang di tanah jalan-an atau tanah bangunan yang dikuasai oleh Daerah.
21. Pajak perusahaan
22. Pajak kendaraan tak bermotor di atas air.
23. Pajak pelabuhan perahu
24. Pajak pembikinan garam
25. Pajak pengangkutan barang ke luar Daerah
26. Pajak Asuransi
27. Pajak atas perusahaan kandang babi
28. Pajak atas pengambilan sarang burung
29. Pajak atas pengambilan rumput laut dan agar-agar
30. Pajak atas pengumpulan telur penyu
31. Pajak rumah asap
32. Pajak mendirikan rumah tembakau

33. Pajak atas pelelangan ikan
34. Pajak Radio
35. Pajak bahasa asing
36. Pajak verponding Indonesia
37. Pajak jalan
38. Pajak potong hewan
39. Pajak Bangunan I
40. Pajak 30 % dari peralihan (keterangan besar)
41. 90 % upah materai
42. Opsen atas Pajak Rumah Tangga
43. Opsen atas pajak verponding
44. Opsen telepon.

Dari keseluruhan pajak-pajak Daerah Tingkat II tersebut sebenarnya sudah dapat dikatakan cukup atau memadai. Akan tetapi dalam kenyataannya, banyak jenis pajak itu yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II tidak otomatis mencerminkan besarnya nilai nominal pendapatan yang diterima oleh pemerintah Daerah Tingkat II. Atau dengan kata lain tidak dapat dipergunakan sebagai indikator yang representatif untuk menilai besarnya pendapatan daerah dari sektor pajak. Demikian pula halnya dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dalam mengelola sumber Pajak daerah belum mencapai hasil yang diinginkan, sekalipun obyek-obyek pajak yang ada di daerah itu sudah cukup banyak.

Untuk melihat bagaimana realisasi Daerah Tingkat

II Gowa mengenai penerimaan pendapatan dari sumber Pajak ini dapat dilihat pada bab III Skripsi ini.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah juga merupakan pendapatan Daerah yang juga dipungut berdasarkan peraturan undang-undang. Dalam hal ini Retribusi daerah ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1974. Sedangkan aturan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1957 dan Peraturan-peraturan daerah sebagai aturan pelaksana.

Pengertian Retribusi Daerah secara umum dapat diartikan "pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukakan oleh mereka yang menggunakan jasa Negara". Sedangkan menurut Rochmat Sumitro (op cit : 34) mengatakan bahwa :

"... iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, ia tidak dikenakan iuran itu".

Dari pengertian itu terlihat beberapa ciri-ciri tertentu dari Pajak Daerah, yaitu :

- a. retribusi dipungut oleh Negara
- b. dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- c. retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan Negara.

Sementara pendapat lain dikemukakan oleh The Liang Gie merumuskan Retribusi Daerah, yaitu :

"Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung".

Sedangkan dalam UU No. 22 tahun 1948 ditegaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan pendapatan oleh pemerintah sebagai pengganti (kerugian) diensten yang diberikan oleh Daerah kepada siapa saja yang membutuhkan diensten itu.

Dari defenisi-defenisi di atas dapatlah disimpulkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah.

Dengan demikian dapatlah dilihat apa yang menjadi ciri pokok yang terdapat pada Retribusi Daerah, yaitu :

1. Uang leges
2. Bea jalan, jembatan dan tol
3. Bea pangkalan
4. Bea penambangan
5. Bea pemeriksaan/pembantaian hewan
6. Uang sewa tanah/bangunan
7. Uang sempadan dan izin bangunan
8. Uang pemakaian tanah milik daerah
9. Bea penguburan
10. Retribusi pengerukan kakus/WC.

11. Retribusi pelelangan ikan
 12. Izin perusahaan industri kecil
 13. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 14. Retribusi jembatan timbang
 15. Stasiun Bis dan taksi
 16. Balai pengobatan
 17. Retribusi reklame
 18. Retribusi pasar
 19. Sewa pasanggrahan
 20. Retribusi pengeluaran hasil pertanian, hasil hutan dan hasil laut.
 21. Bea pemeriksaan susu, dan lain-lain
 22. Retribusi tempat rekreasi
3. Perusahaan Daerah

Sumber pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah Perusahaan Daerah. Dalam hal ini, laba Perusahaan Daerahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi Daerah. Oleh sebab itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum yakni efisien.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 pengertian Perusahaan Daerah dirumuskan sebagai :

"suatu badan usaha yang dibentuk oleh Daerah , untuk memperkembangkan perekonomian Daerah dan untuk menambah penghasilan Daerah"

Pengertian di atas menggambarkan adanya dua fungsi pokok Perusahaan Daerah yaitu :

- a. Sebagai dinamisator perekonomian Daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan/stimulus bagi perkembangan perekonomian Daerah.
- b. Sebagai penghasil pendapatan Daerah, yang berarti perusahaan Daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke Kas Daerah.

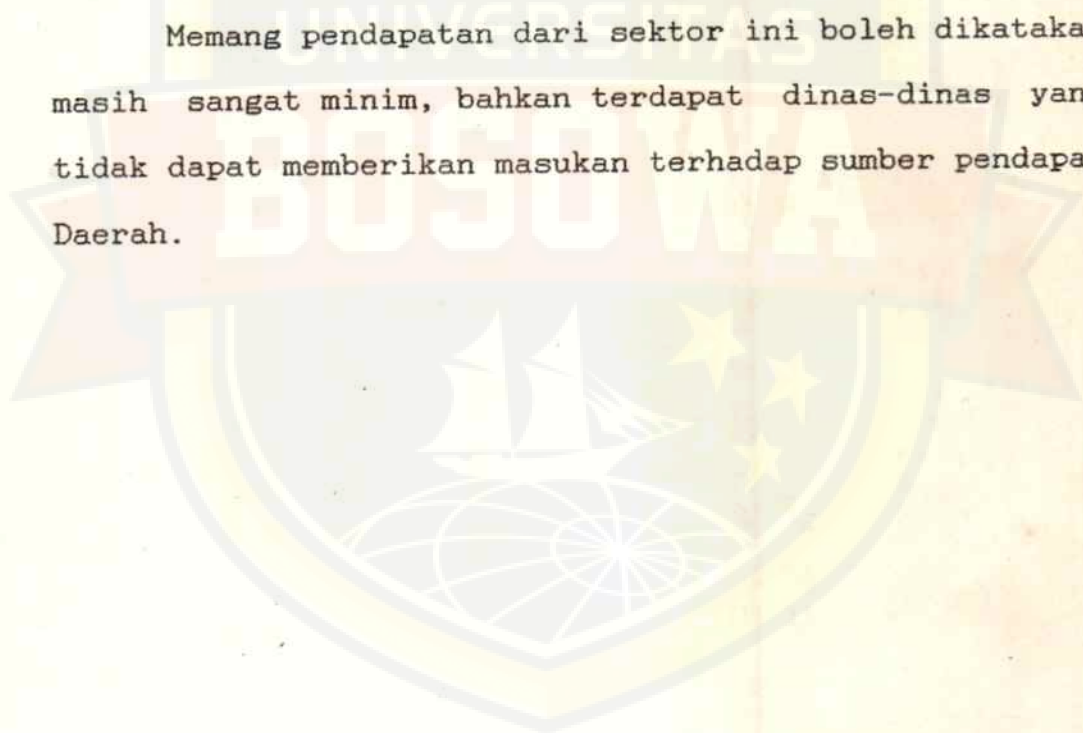
Sedangkan sifat dan tujuan Perusahaan Daerah dapat kita temukan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1962. Disebutkan bahwa yang menjadi sifat Perusahaan daerah adalah ; memberi jasa; menyelenggarakan pemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Sedangkan yang menjadi tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional pada umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.

4. Dinas Daerah Dan Pendapatan Asli Lainnya.

Dinas-dinas Daerah dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang dipungut oleh Daerah secara sah adalah juga sumber pendapatan asli Daerah yang dapat memberikan dari sektor pembiayaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas-dinas Daerah adalah

tidak terlalu memperhitungkan untung ruginya, tetapi dalam batas-batas tertentu Dinas-dinas Daerah ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat bertindak secara ekonomis. Hal ini disebabkan Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Disamping itu, pembentukan, susunan organisasi dan formasi dinas daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga urusan-urusan yang dilakukan oleh dinas-dinas tersebut adalah masih dalam koordinasi pemerintah daerah. Demikian pula dalam hal pertanggungjawabannya kepada Kepala Daerah.

Memang pendapatan dari sektor ini boleh dikatakan masih sangat minim, bahkan terdapat dinas-dinas yang tidak dapat memberikan masukan terhadap sumber pendapat Daerah.



B A B III

GAMBARAN UMUM SUMBER PENDAPATAN

ASLI DAERAH KAB. DATI II GOWA

A. Pendapatan dari Sektor Pajak Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa merupakan wilayah yang terletak di jazirah bagian Timur Sulawesi Selatan. Daerah Tingkat II ini memiliki potensi yang cukup banyak untuk meningkatkan kemampuan otonominya. Hal ini disebabkan daerah ini merupakan daerah yang mempunyai kemampuan untuk lebih meningkatkan kemampuannya disegala bidang.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa pemerintahan Daerah Tingkat II Gowa yang melaksanakan otonomi daerahnya telah mengupayakan segala potensi yang dimilikinya. Salah satu diantaranya adalah dalam hal penerimaan pendapatan asli daerah yang dikelola secara langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa. Dinas ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah. Karena itu penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dati II Gowa yang dikelola oleh DPD telah banyak memberikan sumbangsinya terhadap pembangunan Daerah Tingkat II Gowa yang secara umum telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk lebih jelasnya mengenai pendapatan Asli Daerah yang dalam hal ini adalah dari sektor perpajakan maka dapat dilihat beberapa jenis yang menjadi sumber pendapa-

tan dari sektor ini yaitu :

1. Pajak potong hewan
2. Pajak pembangunan I
3. Pajak Radio
4. Pajak bangsa Asing
5. Pajak Tontonan Daerah
6. Pajak Reklame
7. Pajak kendaraan tidak bermotor
8. Pajak penerangan jalan
9. Pajak pendaftaran perusahaan

Kesembilan jenis pajak yang telah dilakukan oleh Daerah Tingkat II Gowa ini adalah didasarkan pada obyek-obyek pajak yang ada di Daerah tersebut. Jenis-jenis data di atas adalah didasarkan pada tahun 1989/1990.

Berikut ini kita akan lihat realisasi dan target pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II gowa dari sektor perpajakan yang dihitung sejak tahun 1985/1986 sampai dengan tahun 1989/1990.

1. Realisasi Penerimaan Pendapatan dari Sektor Pajak Daerah.

Pada tahun 1985/1986 pendapatan sektor Pajak Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa oleh Dinas Pendapatan Daerah mencapai sebesar Rp. 91.728.131,- sementara target yang ingin dicapai adalah sebesar Rp. 125.000.000,- Dengan realisasi yang demikian itu berarti dari sektor pajak hanya mencapai 73,09%. Jenis-jenis pajak yang

menjadi sumber pendapatan tersebut pada tahun 1985/1986 adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Jalan
- b. Pajak Potong Hewan
- c. Pajak Pembangunan I
- d. Pajak Radio
- e. Pajak Bangsa Asing
- f. Pajak Tontonan
- g. Reklame
- h. Pajak Kendaraan tidak bermotor
- i. Pajak Penerangan Jalan
- j. Pajak Pendaftaran perusahaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai penerimaan dari masing-masing pajak tersebut di atas dapat dilihat tabel berikut ini :

TABEL III 1
PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH DARI
SEKTOR PAJAK TAHUN 1985 / 1986

Jenis Penerimaan Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Jalan	72.000.000,-	35.000.000,-	49,43
Pajak Potong Hewan	30.000.000,-	37.995.566,-	126,65
Pajak Pembangunan	6.000.000,-	6.514.980,-	108,58
Pajak Radio	-	-	-
Pajak Bangsa Asing	1.000.000,-	573.250,-	57,32
Pajak Tontonan	2.500.000,-	-	-
Pajak Reklame	500.000,-	92.300,-	18,46
Pajak Kendaraan Tidak Bermotor	3.500.000,-	-	-
Pajak Penerangan Jalan	6.000.000,-	6.308.685,-	105,14
Pajak Pendaftaran Perusahaan	4.000.000,-	4.647.700,-	116,19
Jumlah	125.500.000,-	91.728.131,-	73,09

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gowa.

Kalau kita perhatikan data diatas menggambarkan bahwa pada sektor Pajak Jalan masih menduduki peringkat teratas dari pendapatan sektor Pajak, kemudian pada jenis Pajak Potong Hewan sebagai peringkat kedua. Namun demikian jika dilihat dari sudut realisasi maka pada sektor Pajak Potong Hewan mencapai 126,65 % dari target yang ingin dicapai. Sedangkan pada sektor Pajak Pendaf-

taran Perusahaan mencapai 116,19 % dari target yang ingin dicapai.

Selanjutnya pada tahun 1986/1987 penerimaan di sektor pajak Daerah ini mencapai Rp. 85.125.197,- sementara target yang ingin dicapai sebesar Rp.89.000.000, Ini berarti prosentase yang dicapai sebesar 95,64 %. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel berikut ini :

TABEL III 2
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH OLEH DPD KAB. GOWA

TAHUN 1986 / 1987

Jenis Penerimaan Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
P a r e j a	5.000.000,-	417.100,-	8,34
Pajak Potong Hewan	50.000.000,-	42.204.000,-	84,40
Pajak Pembangunan	10.000.000,-	8.643.850,-	86,43
Pajak Bangsa Asing	1.000.000,-	354.200,-	35,42
Pajak Tontonan Daerah	-	-	-
Pajak Reklame	500.000,-	217.722,-	43,54
Pajak kendaraan tidak bermotor	3.500.000,-	-	-
Pajak Penerangan jalan	15.000.000,-	28.181.825,-	187,87
Pajak Pendaftaran Perusahaan	4.000.000,-	5.106.500,-	127,66
J u m l a h	125.000.000,-	91.728.131,-	73,09

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Tabel di atas menggambarkan bahwa penerimaan dari sektor Pajak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka tahun 1986/1987 mengalami penurunan sebesar 7,20%.

Sedangkan penerimaan Pendapatan Daerah pada sektor Pajak tahun 1987/1988 mencapai Rp. 80.299.986,- sementara target yang ingin dicapai sebesar Rp. 104.000.000,-. Dan untuk lebih jelasnya mengenai perincian penerimaan pendapatan Pajak Daerah tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL III 3
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN

PAJAK DAERAH DPD KAB. GOWA

TAHUN 1987 - 1988

Jenis Penerimaan Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Potong Hewan	55.000.000,-	24.086.000,-	43,79
Pajak Pembangunan I	15.000.000,-	15.040.094,-	100,26
Pajak Bangsa Asing	500.000,-	388.195,-	77,63
Pajak Tontonan Daerah	1.000.000,-	366.000,-	36,60
Pajak Reklame	2.000.000,-	919.750,-	45,98
Pajak kendaraan tidak bermotor	3.500.000,-	1.397.575,-	39,93
Pajak Penerangan jalan	20.000.000,-	31.968.772,-	159,84
Pajak Pendaftaran Perusahaan	7.500.000,-	6.133.000,-	81,77
J u m l a h	104.500.000,-	80.299.986,-	76,84

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Dari data tersebut di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa penerimaan sektor Pajak Daerah, maka target yang ingin dicapai pada Pajak Potong Hewan menduduki peringkat teratas, namun realisasi yang dapat dicapai hanya 43,79 %. Sedangkan pada Pembangunan I melebihi target yang ingin dicapai yakni sebesar 100,26 % dan pada penerimaan Pajak Penerangan Jalan juga melebihi target sebesar 159,84 %. Dan pada jenis-jenis pajak lainnya hanya dapat mencapai antara 39 % sampai dengan 81 %.

Kemudian pada tahun 1988/1989 penerimaan dibandingkan tahun sebelumnya yakni hanya mencapai Rp. 71.437.869,- sementara target yang ingin dicapai sebesar Rp. 107.250.000,-. Berikut ini dapat dilihat penerimaan Pajak Daerah tahun 1988/1989 melalui tabel berikut ini.

TABEL III 4
 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK
 DAERAH OLEH DPD KAB. GOWA TAHUN
 1988 / 1989

Jenis Penerimaan Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Potong Hewan	20.000.000,-	10.826.000,-	94,13
Pajak Pembangunan I	20.000.000,-	12.902.785,-	64,51
Pajak Radio	5.000.000,-	-	-
Pajak Bangsa Asing	500.000,-	390.125,-	78,02
Pajak Tontonan Daerah	750.000,-	901.750,-	120,23
Pajak Reklame	2.500.000,-	1.995.175,-	79,80
Pajak Kendaraan Tidak bermotor	3.500.000,-	36.500,-	1,04
Pajak Penerangan jalan	50.000.000,-	29.572.034,-	59,14
Pajak Pendaftaran Perusahaan	5.000.000,-	6.813.500,-	136,27
J u m l a h	107.250.000,-	71.437.860,-	66,60

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dari sub sektor Pajak Penerangan Jalan mencapai Rp. 29.572.175,-. Sedangkan yang menduduki urutan kedua adalah pada sub sektor Pajak Pembangunan I yang mencapai Rp. 12.902.785,-. Dan urutan ketiga adalah sub sektor Pajak

Potong Hewan yang mencapai Rp. 10.826.000,-.

Kalau kita melihat pencapaian hasil penerimaan Pajak Daerah tahun 1989/1989 terjadi penurunan jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun anggaran 1989/1990 target yang ingin dicapai sebesar Rp. 101.110.000,- sedangkan realisasi penerimaan pada sektor pajak ini mencapai Rp. 86.226.570,-. Untuk lebih meningkatkan penerimaan sektor Pajak Daerah ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.



TABEL III 5
 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK
 DAERAH OLEH DPD KAB. GOWA TAHUN
 1989 / 1990

Jenis Penerimaan Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pajak Potong Hewan	11.360.000,-	13.165.000,-	115,00
Pajak Pembangunan I	20.000.000,-	16.274.005,-	83,62
Pajak Radio	5.000.000,-	-	-
Pajak Bangsa Asing	500.000,-	352.750,-	70,55
Pajak Tontonan Daerah	750.000,-	450.000,-	60,00
Pajak Reklame	1.500.000,-	1.776.050,-	199,40
Pajak Kendaraan Tidak bermotor	3.500.000,-	-	-
Pajak Penerangan jalan	50.000.000,-	44.163.765,-	88,32
Pajak Pendaftaran Perusahaan	8.500.000,-	9.595.000,-	112,88
J u m l a h	101.110.000,-	86.226.570,-	85,00

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Data pada tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa sub sektor Pajak Penerangan Jalan mencapai Rp. 44.163.765,- sementara target yang ingin dicapai sebesar Rp. 50.000.000,-. Kalau dibandingkan dengan tahun anggaran 1988/1989 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 29.572.034,- atau 66,96%. Sedangkan Sub Sektor Peman-

gunan I penerimaannya mencapai Rp. 16.274.005,-. Dan jika dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya kenaikan sebesar 23,48 %. Dan yang menduduki urutan ketiga pada penerimaan sub sektor Potong Hewan mencapai sebesar Rp. 13.165.000.- sedangkan tahun sebelumnya hanya mencapai Rp. 10.826.000 yang berarti mengalami peningkatan sebesar 17,77 %.

Dengan melihat keterangan-keterangan pada tabel I sampai dengan tabel 5 di atas maka dapat diketahui bahwa sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa pada Sektor Pajak Daerah terjadi penurunan, yakni dari tahun 1985/1986 ke tahun 1986/1987, sebesar 7,20. Dan dari tahun 1986/1987 ke tahun 1987/1988 juga terjadi penurunan sebesar 5,67 %. Kemudian dari tahun 1987/1988 ketahun 1988/1989 terjadi lagi penurunan sebesar 11,04%. Sedangkan pada tahun 1988/1989 ketahun 1989/1990 mengalami kenaikan sebesar 17.15 %.

B. Pendapatan dari Sektor Retribusi Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Sektor Retribusi Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa dapat dikatakan sektor ini telah mampu mencapai hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 1985/1986 penerimaan pendapatan sektor ini mencapai Rp.187.652.865,- telah mengalami peningkatan yang cukup besar dalam 5 tahun terkahir ini, dimana penerimaan pendapatan sektor Retribu-

si Daerah tahun 1989/1990 mencapai sebesar Rp. 388.237.022, ini berarti dalam lima tahun mengalami peningkatan sebesar 51,67 %.

Sumber-sumber penerimaan dari sektor Retribusi Daerah ini terdiri dari :

1. Uang Leges
2. Uang Dispensasi
3. Uang Pangkalan
4. Uang Pemeriksaan Pembantaian
5. Uang Sempadan/Izin Bangunan
6. Uang sewa tanah/Bangunan
7. Stasiun Bus dan Taxi
8. Rumah Sakit dan Balai Pengobatan
9. Tempat Rekreasi
10. P a s a r
11. Uang Jasa Penggarahan
12. Hasil Tanah/Sawah Ornament
13. Retribusi Air/Pipa Pompa
14. Hasil Parkir
15. Penerimaan KTP/KRT
16. Izin Penempatan Usaha
17. Pemberian Nomor Rumah
18. Retribusi Sampah

Kalau kita lihat sumber-sumber penerimaan dari Retribusi, Daerah Kabupaten Dati II Gowa maka dapat dikatakan cukup banyak. Namun diantara sumber-sumber tersebut terda-

pat beberapa sub sektor yang tidak atau belum menghasilkan penerima. Oleh karena itulah untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan penerimaan Pendapatan Sektor dari Sektor Retribusi dengan memperkaya dengan tabel-tabel berikut ini :

2. Realisasi Penerimaan Pendapatan dari Sektor Retribusi Daerah

Pada tahun anggaran 1985/1986 penerimaan sektor retribusi daerah oleh DPD Tingkat II Gowa mencapai sebesar Rp. 187.652.865,-sedangkan target yang ingin dicapai sebesar Rp. 215.000.000,-. Jenis-jenis Retribusi Daerah pada tahun ini sebanyak 18 jenis, sementara realisasi penerimaannya hanya terdiri dari 11 jenis saja. Perlu diketahui bahwa penerimaan pada sektor ini hanya satu jenis yang dapat mencapai target yang di inginkan yakni pada sub sektor "Pasar". Sedangkan lainnya rata-rata mencapai antara 20% sampai dengan 95%.

Untuk lebih jelasnya mengenai penerimaan pada sektor Retribusi Daerah tahun anggaran 1985/1986, maka berikut ini akan dipaparkan ke dalam bentuk tabel seperti berikut ini :

TABEL III 6
 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI
 DAERAH OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH
 KAB. GOWA TAHUN 1985 / 1986

JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	%
Uang Leges	3.500.000,-	2.799.750,-	79,96
Uang disepensasi ja lan/Jembatan	-	-	-
Uang Pengkalan	-	8.121.160,-	-
Uang Pemeriksaan - Pembantaian	6.500.000,-	5.929.000,-	91,21
Uang Sempadan/Izin- Bangunan	47.000.000,-	31.787.750,-	67,63
Uang sewa Tanah/Ba- ngunan	-	-	-
Stasiun Bus dan Taxi	30.000.000,-	26.495.150,-	88,31
Rumah Sakit dan Ba- lai Pengobatan	36.500.000,-	34.896.905,-	95,60
tempat Rekreasi	500.000,-	100.000,-	20,00
P a s a r	65.000.000,-	72.989.150,-	112,29
Uang Jasa Pesangga- rahan	-	-	-
Hasil Tahan/Sawah Ornamnet	-	-	-
Retribusi Air/Pipa Pompa	-	-	-
Hasil Parkir	2.000.000,-	1.045.000,-	52,25
Penerimaan KTP/KRT	18.000.000,-	-	-
Izin Penempatan U- saha	6.000.000,-	3.490.000,-	58,16
Pemberian Nomor Rmh	-	-	-
Retribusi Sampah	-	-	-
Jumlah	215.000.000,-	187.652.865,-	87,28

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gowa.

Tabel tersebut di atas menggambarkan penerimaan dari sektor Retribusi Daerah cukup tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari sektor Pajak Daerah. Pada sektor Retribusi Daerah ini, maka sub sektor Pasar menduduki urutan pertama dalam memberikan pendapatan bagi Daerah Kabupaten Gowa, yakni sebesar Rp. 72.989.150. Sedangkan sub sektor Uang Sempadan/Izin Bangunan menduduki urutan kedua dalam pemberian pendapatan pada sektor Retribusi Daerah yakni Rp. 31.787.750. Dan sub sektor Rumah Sakit dan Balai Pengobatan sebesar Rp. 34.896.905,-.

Selanjutnya dalam tahun anggaran 1986/1987 penerimaan sektor retribusi daerah sebesar Rp. 200.129.255, sementara target yang ingin dicapai adalah sebesar Rp. 202.560.000,-. Ini berarti telah mencapai 98,69% telah terealisasi. Bila kita lihat jumlah atau jenis-jenis Retribusi Daerah pada tahun ini semakin kecil sub sektornya karena hanya terdiri dari 11 sub sektor saja. Tetapi jumlah penerimaan dari masing-masing sub sektor tersebut cukup besar. Hal ini terlihat dengan meningkatnya jumlah penerimaan bila dibandingkan dengan tahun anggaran 1985/1986.

Untuk lebih jelasnya penerimaan Retribusi Daerah pada tahun anggaran 1986/1987, maka berikut ini akan di paparkan ke dalam bentuk tabel.

TABEL III 7
 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN
 RETRIBUSI DAERAH OLEH DPD KAB. GOWA
 TAHUN 1986 / 1987

JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	%
Uang Leges	3.500.000,-	3.229.650,-	92,27
Uang Pemeriksaan - Pembantaian Hewan	6.500.000,-	9.090.500,-	139,85
Uang Sempadan/Izin- Bangunan	40.000.000,-	35.586.000,-	88,96
Stasiun Bus/terminal	30.000.000,-	28.187.500,-	93,95
R.U./Balai Pengo- batan	39.360.000,-	36.397.903,-	92,47
tempat Rekreasi	-	-	-
P a s a r	75.000.000,-	82.803.700,-	110,40
Hasil Parkir	2.000.000,-	1.330.700,-	66,50
Izin Penempatan U- saha	6.000.000,-	3.504.000,-	58,40
Bea Pangkalan	-	-	-
Jumlah	202.560.000,-	200.129.255,-	98,89

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gowa.

Terlihat bahwa tabel di atas menunjukkan penca-
 paian target yang cukup tinggi, dimana sub sektor Pasar
 masih memberikan penerimaan yang paling besar yakni
 Rp. 82.803.700,- yang berarti melebihi target yang akan
 dicapai. Sedangkan sub sektor Rumah Sakit/Balai Pengo-
 batan menduduki urutan kedua dengan tingkat penerimaan

sebesar Rp.36.397.903,-dimana target yang ingin dicapai sebesar Rp. 39.360.000,-. Ini berarti sub sektor Rumah Sakit/Balai Pengobatan telah mencapai 92,47% dari target. Dan sub sektor yang menduduki urutan ke-tiga adalah penerimaan Uang Sempadan/Izin Bangunan dengan realisasi sebesar Rp. 35.586.000,-.

Jika badingkan jumlah penerimaan pada sektor Retribusi Daerah pada tahun 1985/1986 maka terlihat suatu peningkatan sebesar Rp. 12.476.390,- atau sebesar 6,23% Dan pada sub sektor pasar juga terjadi kenaikan jumlah penerimaan sebesar 11,85%. Demikian pula pada sub sektor Rumah Sakit/Balai Pengobatan sebesar 4,12%. Hal ini juga terjadi pada sub sektor penerimaan uang sempadan/Izin Bangunan sebesar 10,67%. Sedangkan sub sektor lainnya juga mengalami peningkatan kecuali pada bidang Bea Pangkalan sama sekali tidak menerima pemasukan sebagaimana penerimaan pada tahun 1985/1986.

Kemudian dalam tahun 1987/1988 penerimaan sektor Retribusi Daerah dicapai sebesar Rp. 283.375.589,- sementara target yang ingin dicapai sebesar Rp.326.710.000,-Dengan demikian realisasi penerimaan mencapai 86,73 %. Tetapi yang jelas bahwa jumlah penerimaan semakin besar sekalipun jumlah sub sektor berkurang menjadi 11 jenis.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL III 8
 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI
 DAERAH OLEH DPD KAB. GOWA
 TAHUN 1987 / 1988

JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	%
Uang Leges	3.500.000,-	3.319.759,-	94,85
Uang Pemeriksaan - Pembantaian Hewan	12.500.000,-	10.265.600,-	92,12
Uang Sempadan/Izin- Bangunan	80.000.000,-	80.536.100,-	100,67
Stasiun Bus/terminal	45.000.000,-	45.607.200,-	101,34
R.U./Balai Pengo- batan	60.000.000,-	38.804.580,-	64,67
tempat Rekreasi	-	310.000,-	-
P a s a r	90.000.000,-	96.406.200,-	107,11
Hasil Parkir	2.000.000,-	1.228.650,-	51,43
KTP / KRT	25.860.000,-	2.100.000,-	8,12
Izin Penempatan U- saha	6.600.000,-	3.536.500,-	53,58
Retribusi Sampah	1.250.000,-	1.262.000,-	100,88

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gowa.

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dari sub-sub sektor, hanya sub sektor KTP/KRT yang tidak mencapai target sampai 50 %. Sementara sub sektor lainnya rata-rata mencapai antara 50 sampai dengan 94%. Sedangkan pada sub sektor Uang Sempadan/Izin Bangunan, Stasiun Bus/terminal, Pasar dan sub sektor Retribusi

Sampah dapat melebihi target. Jika kita bandingkan jumlah penerimaan dari sektor Retribusi ini dengan tahun sebelumnya maka tahun 1987/1988 mengalami kenaikan sebesar Rp. 83.246.334,- atau sebesar 29,34. Sedangkan peningkatan pada sub sektor pasar sebesar Rp.13.602.500. atau sebesar 14,11 %. Dan uang Sempadan mengalami peningkatan yang lebih besar yakni sebesar Rp.44.950.100 atau sebesar 55,81 %. Demikian pula dengan sub-sub antara 53 sampai dengan 94 %, kecuali pada sub sektor KTP/KRT hanya mencapai 8,12 %.

Sedangkan dalam tahun anggaran 1988/1989 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 82.065.262,- atau sebesar 22,46 %. Peningkatan ini disebabkan oleh karena jumlah sub sektor atau jenis-jenis penerimaan Retribusi Daerah bertambah, atau lebih banyak dari jenis-jenis Retribusi Daerah dari tahun 1987/1988. Namun demikian pencapaian target yang ingin dicapai hanya mencapai 61,67 %. Tetapi yang jelas bahwa jumlah penerimaan yang diperoleh dari sektor Retribusi Daerah ini lebih besar dari tahun sebelumnya.

Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL III 9
 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN
 RETRIBUSI DAERAH OLEH DPD KAB. GOWA
 TAHUN 1988/1989

JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	%
Uang Leges	7.500.000,-	6.222.250,-	82,96
Uang Dispensasi jalan	5.000.000,-	2.874.500,-	57,49
Uang Pemeriksaan - Pembantaian Hewan	10.000.000,-	7.332.000,-	73,32
Uang Sempadan/Izin- Bangunan	90.000.000,-	77.390.300,-	85,98
Stasiun Bus/terminal	52.000.000,-	53.915.000,-	103,68
R.U./Balai Pengobatan	75.000.000,-	71.993.501,04	95,99
tempat Rekreasi	3.000.000,-	3.730.000,-	124,53
P a s a r	120.000.000,-	125.660.550,-	104,71
KTP / KRT	20.000.000,-	8.165.700,-	40,62
Izin Penempatan Usaha	6.000.000,-	4.030.000,-	67,61
Pemberian Nomor rumah	-	-	-
Retribusi Sampah	1.200.000,-	2.091.150,-	139,41
Jumlah	592.000.000,-	365.440.852,4	61,67

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gowa.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pada sub-sub sektor mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian pada sub sektor

Pemberian Nomor Rumah hingga tahun 1988/1989 belum memberikan pendapatan bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa.

Kemudian dalam tahun anggaran 1989/1990 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp. 22.832.171,- atau sebesar 5,88%. Demikian pula pada sub-sub sektor juga mengalami kenaikan, kecuali di bidang sub sektor uang Sempadan/Izin bangunan dan Retribusi Daerah mengalami penurunan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



TABEL III 10
 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN
 RETRIBUSI DAERAH OLEH DPD KAB. GOWA
 TAHUN 1989 / 1990

JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	TARGET	REALISASI	%
Uang Leges		6.	82,96
Uang Dispensasi ja- lan	5.250.000,-	4.674.500,-	89,03
Uang Pemeriksaan - Pembantaian Hewan	15.000.000,-	8.182.000,-	54,54
Uang Sempadan/Izin- Bangunan	90.000.000,-	54.296.500,-	60,32
Stasiun Bus/terminal	60.000.000,-	61.375.000,-	102,29
R.U./Balai Pengo- batan	89.551.397,-	98.551.397,-	110,31
tempat Rekreasi	5.000.000,-	5.275.000,-	105,50
P a s a r	125.000.000,-	134.552.900,-	107,64
Hasil Parkir	5.000.000,-	2.373.950,-	47,47
KTP / KRT	-	1.079.400,-	-
Izin Penempatan U- saha	4.000.000,-	5.202.250,-	132,05
Pemberian Nomor rumah	-	-	-
Retribusi Sampah	2.500.000,-	2.087.000,-	93,48
Jumlah	413.086.000,-	388.273.022,-	93,99

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gowa.

Tabel tersebut menggambarkan bahwa pencapaian target sudah mendekati 100 %, hal terbukti dengan jum-

lah penerimaan tahun 1989/1990 mencapai Rp.388.273.022, atau sebesar 93,99 % dari target yang akan dicapai. Demikian pula terlihat bahwa penerimaan dari sub sektor terdapat peningkatan jumlah penerimaan dari sub sektor terdapat beberapa diantaranya melebihi target yang ingin dicapai.

Dari keseluruhan tabel yang telah memaparkan penerimaan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Gowa menunjukkan adanya peningkatan yang cukup baik, dimana dalam lima tahun terakhir ini telah mencapai 51,67 % atau rata-rata peningkatan dari tahun 1985/1986 hingga tahun 1989/1990 sebesar 10,33 %.

C. Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Perusahaan Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Sektor Perusahaan Daerah belum dapat memberikan hasil yang cukup. Hal ini disebabkan Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa hanya terdiri satu buah saja, yaitu : Perusahaan Daerah Karya Gowa.

Dalam tahun anggaran 1985/1986 Perusahaan Daerah Karya Gowa laba yang diperoleh sebesar Rp. 50.000.000,- dengan target yang ingin dicapai juga sebesar Rp. 50.000.000,-. Ini berarti pencapaian tingkat prosentasenya sebesar 100 %.

Kemudian dalam tahun anggaran 1986/1987 Perusahaan Daerah Karya Gowa memperoleh Laba sebesar Rp. 41.000.000,-

sementara target yang ingin dicapai sebesar Rp. 40.000.000. Dengan demikian realisasi penerimaan sebesar 102,50 %.

Selanjutnya dalam tahun anggaran 1987/1988 penerimaan pada sektor Perusahaan Daerah Karya Gowa mencapai sebesar Rp. 17.000.000,- sedangkan target yang akan dicapai hanya sebesar Rp. 15.000.000,-. Hal ini berarti prosentase pencapaian target melebihi 100 %.

Dan dalam tahun anggaran 1988/1989 penerimaan dari sektor Perusahaan Daerah ini mencapai jumlah Rp. 17.000.000 sementara target yang ingin dicapai sebesar Rp. 15.000.000. Dengan demikian pencapaian prosentase target yang ingin dicapai sebesar 113,33 %.

Kemudian terakhir dalam tahun anggaran 1989/1990 perusahaan Daerah memberikan setoran sebesar Rp. 70.650.000 sedangkan target yang ingin dicapai sebesar Rp. 111.895.000 sehingga pencapaian target hanya mencapai 63,13 %.

D. Penerimaan Pendapatan Asli dari Dinas-dinas Daerah Serta Pendapatan Lainnya yang Sah.

Sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Dinas-dinas Daerah juga belum dapat memberikan jumlah yang cukup besar. Hal ini terlihat dalam tahun anggaran 1985/1986 jumlah penerimaan mencapai Rp. 18.125.140,16. Sementara target yang ingin dicapai sebesar Rp. 27.000.000. Dinas-dinas Daerah yang telah memberikan pendapatan bagi Daerah Tingkat II Gowa adalah :

1. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 6.672.495,-

- | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| 2. Dinas Peternakan sebesar | Rp. | 8.365.600,- |
| 3. Dinas Perikanan sebesar | Rp. | 1.327.000,- |
| 4. Dinas Sub Dir. Agraria sebesar | Rp. | 1.760.045,16. |

Selanjutnya penerimaan dalam tahun 1986/1987 menca-
pai Rp. 19.260.044,19. dengan target yang ingin dicapai
sebesar Rp. 22.000.000. Ini berarti pencapaian target
sebesar 87,54 %. Dinas-dinas yang telah memberikan Penda-
patan kepada daerah Tingkat II Gowa adalah :

- | | | |
|--|-----|--------------|
| 1. Dinas Pekerjaan Umum Daerah sebesar | Rp. | 7.211.200,- |
| 2. Dinas Peternakan sebesar | Rp. | 9.051.062,64 |
| 3. Dinas Perikanan sebesar | Rp. | 2.219.222.90 |
| 4. Dinas Sub. Dir. Agraria sebesar | Rp. | 778.558,65. |

Dan dalam tahun anggaran 1987/1988 penerimaan pada
Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gowa ini mencapai sebesar
Rp. 41.514.644,24. Sedangkan target yang ingin dicapai
sebesar Rp. 51.250.000. Dengan demikian prosentase penca-
paian target sebesar 81,00 %. Dinas-dinas yang memberikan
pendapatan dalam tahun anggaran di atas adalah sama dengan
dinas-dinas tahun sebelumnya.

Kemudian dalam tahun anggaran 1988/1989 penerimaan
pada sektor Dinas-dinas Daerah mengalami peningkatan sebe-
sar Rp. 8.142.393,41. atau sebesar 16,40 %. Dinas-dinas
Daerah yang memberikan pendapatan bagi Kabupaten Gowa
adalah sama dengan dinas-dinas daerah tahun sebelumnya.

Dan terakhir adalah dalam tahun anggaran 1989/1990
dimana penerimaan dari Dinas-dinas Daerah mencapai jumlah

Rp. 47.710.468,94. sementara target yang ingin dicapai adalah sebesar Rp. 57.500.000. Dengan demikian prosentase pencapaian target sebesar 83,00 %.

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gowa dalam tahun 1985/1986 hingga 1986/1990 terjadi kenaikan rata-rata sebesar 24,20 % per tahun.

Penjelasan selanjutnya adalah menyangkut Pendapatan Daerah lainnya yang sah, dalam hal ini khusus Kabupaten Dati II Gowa mengelolah sumber-sumber pendapatan Asli Daerahnya yakni pada tahun 1985/19896 terdiri dari :

1. Hasil cicilan penjualan rumah dinas milik Pemda tingkat II Gowa sebesar Rp, tidak tercatat.
2. Hasil cicilan mobil tua milik daerah sebesar Rp. 29.000 sedangkan target yang ingin dicapai sebesar Rp. 2.050.000,-
3. Penerimaan lain-lain diterima sebesar Rp. 5.185.930,- sementara target yang ingin dicapai tidak tercatat.

Dengan demikian jumlah Pendapatan Daerah lainnya pada tahun anggaran 1985/1986 sebesar Rp. 5.477.930,-. Dalam tahun anggaran 1986/1987 penerimaan pendapatan daerah lainnya dari sumber-sumber :

1. Cicilan Mobil sebesar Rp. 232.281,50
2. Pendapatan lain-lain sebesar Rp. 49.812.390.-

Target yang ingin dicapai kedua sumber pendapatan tersebut tidak tercatat.

Selanjutnya dalam tahun anggaran 1987/1988 penerimaan pendapatan daerah lainnya terdiri dari sumber-sumber :

1. Cicilan mobil sebesar Rp. 190.400.-
2. Penerimaan Pasir sebesar Rp. 20.030.000,-
3. Penerimaan lain-lain sebesar Rp. 9.162.265,-

Ketiga sumber penerimaan lain-lain tersebut di atas seluruhnya berjumlah Rp. 29.390.665,- sementara target yang ingin dicapai sebesar Rp. 25.250.000,-

Dan dalam tahun 1988/1989 penerimaan pendapatan Daerah ingin dicapai sebesar Rp. 25.250.000,-

Dan dalam tahun 1988/19889 penerimaan pendapatan Daerah dari sumber-sumber lain terdiri dari :

1. Cicilan Mobil sebesar Rp. 560.000,-
2. Penerimaan lain-lain sebesar Rp. 52.586.985,25.

Sementara target yang ingin dicapai sebesar Rp. 30.250.000,-

Terakhir adalah tahun anggaran 1989/1990, dimana penerimaan pendapatan lainnya terdiri dari sumber-sumber :

1. Cicilan Mobil sebesar Rp. 1.000.000,-
2. Penerimaan lain-lain sebesar Rp. 59.132.779,-

Dengan demikian jumlah penerimaan pada tahun 1989/1990 sebanyak Rp. 60.130.778,- sementara target yang ingin dicapai sebesar Rp. 33.000.000,-

Dengan melihat keterangan-keterangan di atas,

yang menyangkut Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pendapatan lainnya yang sah tergambar bahwa adanya kenaikan tiap tahunnya. Namun demikian penerimaan lain-lainnya yang dimaksud belum diketahui.

E. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Gowa

Struktur organisasi adalah susunan dari fungsi-fungsinya yang ada dalam organisasi yang bersangkutan untuk menjalankan fungsinya itu berdasarkan jalur-jalur tugas yang telah ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi itu tercipta. Jadi struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat Gowa adalah merupakan susunan dari jabatan-jabatan atau fungsi yang didasarkan tugas-tugas dari jabatan-jabatan tersebut yang juga merupakan suatu sistem kerja yang memiliki ciri-ciri tersendiri.

Kalau kita melihat bagaimana struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa, maka dapat dikatakan bahwa struktur tersebut berbentuk koordinasi, dimana terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi masing-masing. Secara keseluruhan jumlah bagian-bagian yang terdapat dalam struktur Organisasi DPD Tingkat II Gowa terbagi kedalam 22 bagian.

Pimpinan organisasi disebut Kepala Dinas yang berfungsi sebagai koordinator seluruh bagian-bagian yang ada dalam organisasi itu. Kepala Dinas ini secara langsung mengepalai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan empat Kepala

Seksi, yaitu Kasie pendaftaran dan Pendapatan, Kasie Penetapan, Kasie Pembukuan dan Pelaporan dan Kasie Penagihan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai Koordinator Tata Usaha pada Dinas tersebut yang mengepalai secara langsung tiga Kepala Urusan yaitu ;

1. Kepala urusan Umum
2. Kepala urusan Kepagawaian dan
3. Kepala Urusan Keuangan.

Selanjutnya Kepala Seki Pendaftaran dan Pendataan, bertugas mengkoordinir pelaksanaan tiga Sub Seksi yaitu :

1. Sub Seksi Pendaftaran
2. Kepala Sub seksi Pendataan dan
3. Kepala Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan.

Kepala Seksi Penetapan juga mengkoordinir tiga sub seksi yaitu :

1. Sub Seksi Perhitungan
2. Sub Seksi Angsuran dan
3. Sub Seksi Penerbitan dan Pengelolaan Data.

Kemudian Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan bertugas mengkoordinir tiga Sub Seksi yaitu :

1. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan
2. Sub Seksi Pembukuan Persediaan dan Sub
3. Sub Seksi Pelaporan.

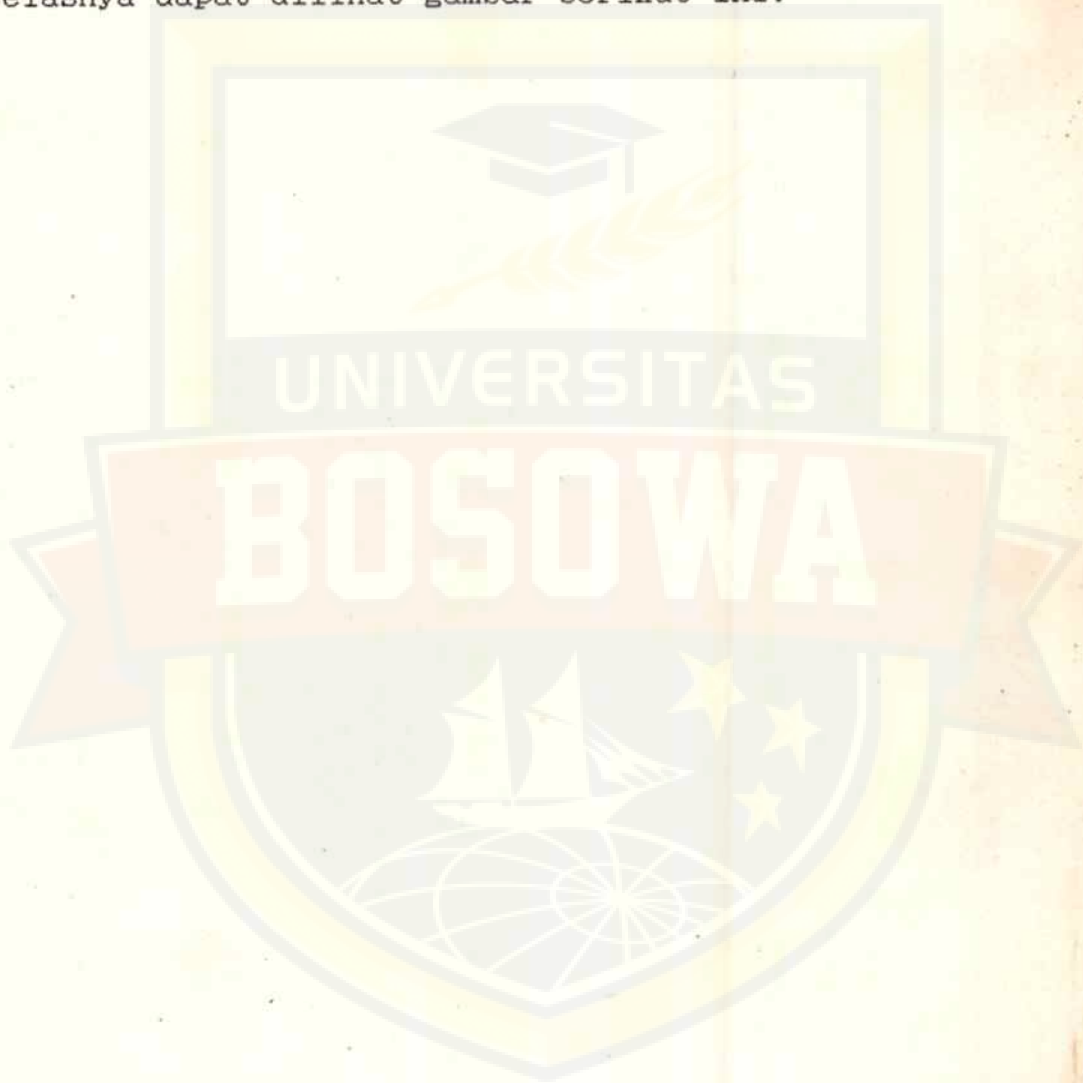
Terakhir adalah Kepala Seksi Penagihan yang juga mengkoordinir tiga Sub Seksi yaitu :

1. Sub Seksi Penagihan

2. Sub Seksi Keberatan

3. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.

Demikian bagaimana garis besar struktur Organisasi Dinas Pendapatan daerah Tingkat II Gowa. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah dalam hal ini adalah Pemda Tingkat II Gowa melalui Dinas Pendapatan Daerahnya telah melakukan berbagai kebijaksanaan yaitu :

1. Kebijaksanaan Intern dan
2. Kebijaksanaan Ekstern.

Kedua kebijaksanaan tersebut, telah dilakukan sejak tahun anggaran 1988/1989 hingga sekarang. Dan dapat kita lihat bahwa sejak tahun itu pula terjadi peningkatan dari sumber Pendapatan Asli daerah.

Karena kedua kebijaksanaan tersebut belum dimengerti sepenuhnya, maka berikut ini akan dijelaskan secara rinci sebagaimana di bawah ini.

1. Kebijaksanaan Intern.

Yang dimaksud dengan kebijaksanaan Intern adalah kebijaksanaan yang dilakukan terhadap seluruh aparatur daerah, terutama terhadap Dinas Pendapatan Daerah. Kebijaksanaan ini terbagi atas tiga bagian yaitu :

a. Peningkatan Pengetahuan tentang Azas-azas Organisasi

Upaya ini untuk meningkatkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Gowa, dimana merupakan suatu aktivitas/kegiatan yang bersi

fat kolektif atau sekelompok orang yang menggunakan organisasi sebagai alat. Dengan demikian setiap anggotanya sangat tergantung pada pengetahuan-pengetahuan yang dimilikinya, terutama mengenai azas-azas organisasi yang dapat diterapkan pada organisasi tersebut akan berpengaruh secara positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Azas-azas organisasi dapat disebutkan antara lain : Perumusan yang jelas, pembagian tugas pekerjaan delegasi kekuasaan, tingkat-tingkatan pengawasan, rentangan kendali, dan kesatuan perintah dan tanggung jawab (The Liang Gie, 1963; 27).

Dengan adanya tujuan yang jelas, maka seseorang mengetahui secara tepat apa yang menjadi maksud dan tujuan organisasi sehingga akan menumbuhkan motivasi yang kuat baginya dalam melakukan pekerjaan dalam organisasi itu.

Demikian pula adanya pembagian tugas akan memperjelas batas-batas wewenang, kewajiban dan tanggung jawab, sehingga kekacauan, konflik kewenangan/kekuasaan, tumpang tindih atau kecenderungan menghindari tanggung jawab dapat dihindari. Delegasi atau pelimpahan wewenang akan memberikan tanggung jawab terhadap tugas dimaksud, karena ia memiliki wewenang penuh dalam bidang ini.

Adanya kesatuan perintah akan menghindari ke

bingungan dan keraguan bawahan dan akan memperjelas pertanggungjawaban.

Dengan gambaran sekilas di atas, terlihat betapa vitalnya penerapan prinsip-prinsip organisasi dalam menentukan keberhasilan organisasi. Sama halnya dengan Pemungutan terhadap Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lainnya yang sah juga merupakan suatu aktivitas yang bersifat kolektif, yang dalam hal ini dilakukan oleh suatu organisasi yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Sebagai organisasi, maka dengan sendirinya Dinas ini tidak dapat melepaskan diri dari keharusan untuk menerapkan azas-azas organisasi di atas, apabila benar-benar usaha pencapaian tujuan ingin terwujud. Kemudian dalam menerapkan azas-azas organisasi dimaksud, maka pertama-tama aparatur Dinas Pendapatan Daerah harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang azas-azas organisasi, karena tanpa pengetahuan yang cukup, terlampau sulit bagi aparatur Dinas yang bersangkutan untuk melakukan fungsinya sebagai pengelola sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana yang dilihat pada pencapaian hasil pada sumber pendapatan asli Daerah dari tahun 1988/1989 sampai dengan tahun anggaran 1989/1990 terdapat kenaikan yang cukup tinggi, dimana penerimaan dari hasil Pajak Daerah pada tahun 1988/1989 sebesar

Rp.71.437.869,- sedangkan pada tahun anggaran 1989/1990 meningkat sebesar Rp. 86.226.570,- atau terjadi kenaikan sebesar 12 %. Demikian pula dengan pendapatan dari sektor Retribusi Daerah yang pada tahun anggaran 1988/1989 penerimaan sebesar Rp.365.440.851,04,- sedangkan pada tahun anggaran 1989/1990 terjadi kenaikan pula menjadi Rp. 388.273.022 atau prosentase kenaikannya sebesar %. Sedangkan pendapatan dari Dinas-dinas pada tahun anggaran 1988/1989 hanya mencapai sebesar Rp. 49.657.247,65 sedangkan tahun anggaran 1989/1990 mencapai Rp.47.710.468,94. Pada pendapatan ini terjadi penurunan oleh karena pada dasarnya sumber penerimaan dari sektor ini memang tidak terlalu diharapkan, jadi bukan karena unsur penerapan dari azas-azas organisasi. Kemudian pada tahun anggaran 1988/1989 disektor Perusahaan Daerah mencapai sebesar Rp. 17.000.000,- sedangkan pada tahun anggaran 1989/1990 sebesar Rp. 70.650.000,-. Ini berarti terjadi kenaikan yang besar sekali dari sektor pendapatan dari Perusahaan Daerah.

Selanjutnya pada penerimaan pendapatan dari sektor pendapatan lain-lain pada tahun anggaran 1988/1989 penerimaan sebesar Rp. 52.586.985,25, sedangkan pada tahun anggaran 1989/1990 sebesar Rp. 60.132.778. Dengan demikian terjadilah kenaikan

sebesar 8 %.

Dengan melihat tingkat keberhasilan tersebut di atas jelas menggambarkan bahwa dengan adanya kebijaksanaan untuk menambah pengetahuan aparatur Daerah di bidang azas-azas organisasi juga sangat menentukan keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Dati II Gowa.

b. Disiplin Kerja Yang Tinggi.

Sekalipun penggunaan teknologi yang canggih pada suatu instansi, tetapi tidak dibarengi dengan faktor manusia yang dalam hal ini adalah kedisiplinan kerja, maka teknologi canggih tersebut tidak akan berarti banyak. Jadi disini faktor manusia merupakan faktor sentral yang menentukan seluruh gerak dan aktivitas suatu organisasi. Olehnya itu faktor-faktor lainnya seperti materi/benda, uang/modal dan sebagainya hanya dapat dimanfaatkan bagi organisasi kalau manusia yang mengelolanya mempunyai kemampuan/ daya membangun dan bukan sebaliknya. Dalam pengertian ini berarti unsur manusia akan berkurang apabila tidak disertai dengan ketaatan pada peraturan atau prosedur aturan permainan yang berlangsung dalam organisasi. Dengan perkataan lain diperlukan adanya disiplin kerja yang tinggi agar manusia benar-benar berfungsi sebagai kekuatan membangun.

Disiplin dapat ditegakan sebagai "suatu kekua-

tan yang berkembang di dalam tubuh pekerja sendiri dan menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan tingkah-laku", (Alfred A. Lateiner dan I.E. Levine, 19 : 67).

Dinas Pendapatan Daerah sebagai organisasi yang bertanggung-jawab atas pungutan Pajak, Retribusi dan pungutan-pungutan lainnya yang sah, hanya dapat difungsikan secara baik dan maksimal apabila para pegawainya memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi. Oleh karena selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Daerah juga terikat pada disiplin kerja yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No 30/80 yang mendasarkan diri pada pasal 29 UU No. 8/1974.

c. Pengawasan Yang Efektif.

Faktor pengawasan adalah salah satu faktor yang esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, sesuai instruksi atau azas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam pekerjaan untuk kemudian diperbaiki, dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efektif dan efisien ataukah tidak.

Dinas Pendapatan Daerah tidak terlepas dari keharusan akan adanya pengawasan. Apalagi yang dike-

lolah oleh Dinas ini adalah menyangkut keuangan Daerah. Karena itu setiap penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan rencana dapat menggoyahkan sendi-sendi penyelenggaraan otonomi daerah.

Hal yang sangat penting dalam pengawasan adalah menentukan standard (alat pengukur), mengadakan penilaian (Evaluate) dan mengadakan tindakan perbaikan (corective action) di mana ketiga hal tersebut sebagai suatu proses pengawasan.

Pada tahap awal setiap prses pengawasan harus diawali dengan penetapan standard atau alat pengukur yang ditetapkan atas dasar hasil/akibat yang benar-benar terjadi dan dapat dinilai. Standar juga memuat pernyataan tentang tujuan organisasi. Standar yang ditetapkan dapat dalam bentuk fisik, meliputi kualitas dan kuantitas hasil yang dicapai, dalam bentuk uang, meliputi standar biaya dan investasi.

Setelah melewati tahap ini dapat dilakukan penilaian hasil-hasil yang ada berdasarkan standar yang telah ditentukan. Dari sinilah diketahui ada atau tidaknya penyimpangan atau ketidaksesuaian.

2. Kebijakan Ekstern

Yang dimaksud disini dengan kebijakan Ekstern adalah suatu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah terhadap berbagai kemungkinan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Cara

ini dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu :

a. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.

Untuk dapat menunjang keberhasilan program Dinas Pendapatan Daerah, terutama terhadap upaya peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan mengusahakan kesadaran masyarakat, terutama dalam hal pembayaran pajak yang dibebankan kepadanya. Karena seperti diketahui bahwa pajak-pajak yang diperoleh tersebut adalah dari masyarakat itu sendiri, sehingga dari pembayaran pajak yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah akan dilahirkan kepada pembangunan Daerah itu sendiri. Dan dengan demikian baik yang secara langsung dinikmati oleh masyarakat, maupun yang tidak, tetapi yang jelas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan tingkat kesadaran yang tinggi inilah dalam aplikasinya akan meningkatkan pula partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah.

Disinilah letak pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kewajibannya selaku warga negara.

b. Pengelolaan Sumber-sumber Pajak

Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah yang berfungsi untuk mengelolah sumber-sumber pendapatan tersebut harus memiliki kemampuan di dalam melihat berbagai kemungkinan yang dapat dijadikan sebagai

sumber-sumber baru dari Pendapatan Asli Daerah. Karena tanpa sumber pendapatan tersebut maka apa yang diharapkan akan menjadi sia-sia. Demikian pula bahwa sumber pendapatan yang telah ada dapat terus ditingkatkan sehingga jumlah kualitas maupun kuantitasnya juga semakin tinggi.

B. Proses Penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh DIPENDA Tingkat II Gowa.

Untuk mengelolah penerimaan Pendapatan Asli Daerah diperlukan suatu keahlian tersendiri, disamping peraturan hukum sebagai dasar operasional didalam melakukan proses penerimaan itu. Oleh karena itu yang berfungsi sebagai pengelolah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sudah sewajarnya harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan peranan dan fungsinya.

Dan sebagaimana diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah : Hasil Pajak, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Daerah dan Pendapatan lain-lain sebagai usaha dari Daerah yang sah. Mengenai ini dapat dilihat dalam Pasal 58 UU Pokok Pemerintah di Daerah No. 5 Tahun 1974. Pasal ini mengatur Undang-Undang ditetapkannya ketentuan pokok pajak daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan untuk pungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Demikian pula Perusahaan Daerah dan pendapatan lainnya diatur di dalam keketentuan pokok Undang-undang yang aturan pelaksanaannya ditentukan

oleh pemerintah daerah bersangkutan.

Kantor Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari beberapa Kepala sub, Kepala Urusan Umum, Kepala Seksi serta sub bagian seksi yang kesemuanya mempunyai tugas masing-masing.

Olehnya itu, Proses Penerimaan Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada fungsi, tugas dan tanggung jawab dari bagian-bagian yang terdapat pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah. Untuk melihat kejelasan proses Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka akan dibahas lebih dulu Kepala Seksi dan Sub Seksi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

1. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendapatan

Pada bagian ini dilakukan proses pendaftaran berdasarkan data-data yang didapatkan dari sub-sub bagian yang berada dibawahnya, Sub seksi pendaftaran bertugas untuk mendaftarkan berbagai sumber pajak yang masuk sebagai pendapatan daerah, sedangkan sub seksi pendaftaran adalah mengukur tingkat pendapatan yang telah diterima dari berbagai sumber pajak yang masuk, kemudian memberikannya kepada Kepala Seksi untuk diperiksa. Data yang didapatkan tersebut di ambil dari sub seksi Dokumentasi dan pengolahan data, yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

2. Kepala Seksi Penetapan.

Pada bagian ini adalah berfungsi untuk mendapatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diambil dari sub Seksi Perhitungan, sub seksi Angsuran

dan sub seksi Penerbitan dan Pengolahan data.

Proses penerimaan pada bagian ini adalah menentukan seberapa besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah seberapa besar angsuran yang akan diterima melalui Penerbitan pada terutang terhadap Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

3. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

Pada bagian ini proses penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan melakukan pembukuan dan pelaporan yang diambil dari sub seksi penerimaan pembukuan, sub seksi Pembukuan persediaan dan sub seksi pelaporan. Proses ini dilakukan terhadap penerimaan-penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang telah diterima dari seksi Penagihan.

4. Kepala Seksi Penagihan

Pada bagian ini seluruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya yang sah melakukan penagihan terhadap terutang. Pelaksanannya adalah dengan menerima laporan dari Sub Seksi Penagihan, Sub Seksi Keberatan dan Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.

Setelah keempat Kepala Seksi tersebut merampungkan seluruh tugas-tugasnya, kemudian melaporkannya kepada Kepala Urusan keuangan dan dari Kaur ini kemudian ini laporkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya diperiksa oleh Kepala Dinas.

Demikian proses dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa. Proses tersebut didasarkan pada Struktur Organisasi dari Dinas Pendapatan Asli Daerah sendiri.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tk. II Gowa.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah memang mempunyai prospek yang baik, namun tidak berarti bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prospek tersebut. Hal ini disebabkan beberapa hal yang masih harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terkait, baik oleh pemerintah daerah bersangkutan, maupun pemerintah vertikal yang lebih tinggi. Terutama sekali dalam lapangan pajak, masih banyak yang perlu diperhatikan misalnya tentang obyek pajak yang memang tidak ada, peraturan pelaksanaannya tidak ada atau berbelit-belit sehingga menyulitkan pemerintah Daerah mendapat kesulitan dalam hal ini. Hal ini merugikan Daerah setempat, juga terhadap Retribusi Daerah, Pendapatan Perusahaan Daerah dan Pendapatan lainnya yang sah. Untuk lebih jelasnya mengenai masalah tersebut dapat dilihat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain adalah :

1. Obyek/sumber Pendapatan Tidak ada di Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa Daerah-daerah di Indonesia memiliki spesifikasi/kekhususan yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan geografis, budaya,

adat istiadat, agama, bahasa, tingkat ekonomi dan sebagainya. Oleh sebab itu, sekalipun kepada Daerah diberikan wewenang untuk memungut pendapatan yang berkenaan dengan obyek-obyek Pajak, Retribusi dan pendapatan lainnya sudah dapat dipastikan Daerah tersebut tidak dapat melakukannya karena secara riil obyektif, obyek pendapatan tersebut tidak dimiliki Daerah.

Kesulitan yang muncul adalah bahwa sekalipun realitas perbedaan antara Daerah-daerah ini nyata-nyata ada tetapi sistem pengaturan dan pemberian jenis pajak dan Retribusi pada Daerah sejauh ini masih bersifat seragam sehingga mengabaikan atau kurang memperhatikan realitas yang ada. Oleh karena itu dapat lebih memberikan posisi yang kuat bagi pendapatan daerah dalam memberikan kontribusinya bagi Pemerintah Daerah diperlukan adanya sistem baru yang dapat lebih menjamin kesesuaian antara realitas obyektif yang ada di Daerah-daerah. Dalam hal ini kesesuaian formal dan materil dicapai. Sehingga pada suatu Daerah tidak terjadi pemberian jenis pungutan Pajak dan retribusi justru kesesuaian seperti dimaksud di atas akan sulit bagi Daerah-daerah untuk mengandalkan lainnya sebagai penopang utama keuangannya.

Agar supaya kesesuaian di atas dicapai, maka pemberian jenis-jenis Pajak dan Retribusi kepada Daerah-daerah pertama-tama harus didasarkan pada potensi

riil obyek Pajak dan Retribusi yang dimiliki Daerah. Atau dengan perkataan lain dasar pertimbangan utama pemberian Jenis Pajak dan Retribusi Daerah tertentu kepada daerah haruslah benar-benar dapat menjamin Daerah-daerah akan dapat memungut atau memanfaatkannya.

2. Hasil Pungutan Lebih Kecil dari Biaya Pemungutan.

Sulitnya jenis Pajak dan Retribusi Daerah tertentu, karena memang dalam kenyataannya sebahagian besar Pajak dan Retribusi yang diserahkan tergolong ke dalam pajak dan retribusi yang kurus. Pajak-pajak serta retribusi Daerah yang tergolong kurus ini, karena sifatnya adalah mengatur (reguleerend) dan bukannya bersifat budgetair, sehingga memang tidak mungkin menghasilkan nilai nominal yang cukup walaupun Daerah-Daerah dapat memungutnya.

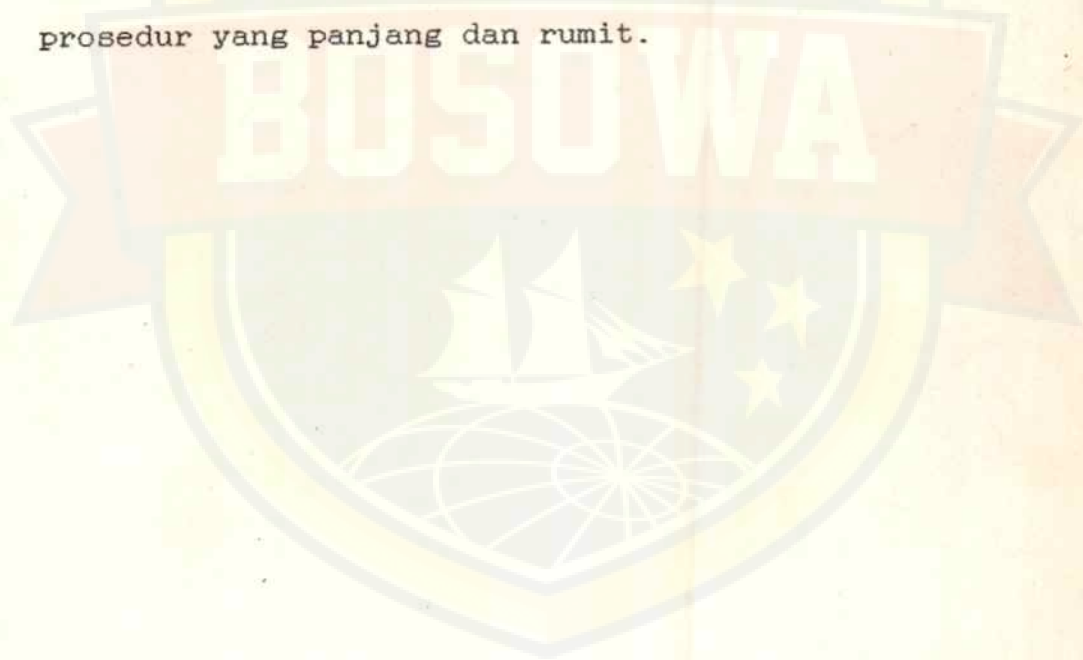
3. Peraturan dan Pedoman Pelaksanaannya Belum Ada.

Terdapat beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerahnya, tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada sehingga untuk memungut sumber pendapatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, sekalipun telah diserahkan menjadi wewenang daerah-daerah. Tergolong dalam pendapatan ini adalah Pajak berdiam disuatu tempat daerah lebih dari 120 hari tanpa bertempat tinggal yang tetap.

Dengan demikian, pemberian sumber pajak bagi

aderah tanpa diikuti oleh peraturan dan pedoman pelaksanaannya merupakan pemberian yang mubazir, karena secara riil Daerah tidak mungkin mengusahakannya. Dan berarti pula tidak adanya sumber pajak atau retribusi daerah sekalipun secara formal telah diberikan.

Disamping itu, tata cara pemberian persentase dari Pajak Negara dan Retribusi Negara kepada Daerah-Daerah sangat rumit dan berbelit-belit, sehingga sekalipun Daerah-daerah secara formal berhak atas persentase tertentu dari Pajak Negara dan Retribusi Negara tetapi untuk benar-benar mendapatkannya harus melalui prosedur yang panjang dan rumit.



BAB V

P E N U T U P

A. K e s i m p u l a n

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab-bab terdahulu maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan seperti berikut ini :

1. Bahwa Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa dalam meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerahnya terdiri dari dua kebijaksanaan pokok yaitu :

- a. Kebijaksanaan Intern yang terdiri dari :

- 1) Peningkatan Pengetahuan Pegawai terhadap azas-azas organisasi.
- 2) Peningkatan Disiplin Kerja yang tinggi.
- 3) Melakukan pengawasan yang efektif.

- b. Kebijaksanaan Ekstern yang terdiri dari :

- 1) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.
- 2) Pengelolaan Sumber-sumber Pajak.

2. Bahwa sistem atau proses penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Gowa adalah didasarkan pada sistem kerja organisasi, dimana dalam organisasi tersebut masing-masing fungsi melakukan proses penerimaan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Gowa pada Kantor Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Obyek/Sumber Pendapatan Asli Tidak ada di Daerah Kabupaten Gowa.
- b. Hasil pungutna lebih kecil dari biaya pemungutan.
- c. Pengaturan dan Pedoman pelaksanaannya belum ada.

B. Saran-saran

Setelah melihat uraian serta penjelasan-penjelasan dari keseluruhan isi skripsi ini, maka penulis mencoba untuk memberikan sumbang saran terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa, khususnya kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah guna lebih meningkatkan pendapatan Asli Daerah seperti berikut ini :

1. Bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan asli Daerah diperlukan suatu kemampuan dari seluruh pegawai yang terdapat pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah mengenai Sistem kerja yang lebih efektif dan efisien dengan jalan memberikan pendidikan-pendidikan khusus bagi pegawai yang terarah pada bidang masing-masing yang terdapat pada kantor tersebut.
2. Oleh karena Kantor Dinas Pendapatan Daerah menyangkut tentang Keuangan Daerah maka untuk lebih mengefektifkan keuangan Daerah tersebut diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat sehingga penyimpangan-penyimpangan terhadap jalur tujuan yang ingin dicapai dapat dihindari.
3. Perlunya peningkatan terhadap usaha-usaha pengelolaan sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan membuat

Peraturan-peraturan Daerah yang lebih efektif, sehingga pelaksanaan sumber-sumber pendapatan tersebut dapat lebih mudah dan efisien.

